



Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman

Suhardi Mukhlis¹⁾, Rendra Setyadiharja²⁾*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Jl. Raja Haji Fisabilillah Km 8 No.48 Tanjungpinang.

* Korespondensi Penulis. E-mail: rendra_tanjungpinang@yahoo.co.id, Telp: +62812-6866-0986

Abstrak

Poros maritim adalah salah satu paradigma pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh wilayah yang berbasis kemaritiman seperti Provinsi Kepulauan Riau. Dengan paradigma pembangunan tersebut ekspektasinya adalah pembangunan di wilayah berbasis maritim akan merasa lebih adil dan sesuai dengan karakter wilayah maritim tersebut dibanding pembangunan yang seolah diseragamkan dengan paradigma kontinental. Budaya kemaritiman seyogyanya adalah budaya asli Indonesia, dimana Indonesia adalah Negara Kepulauan. Hal paling esensi adalah masyarakat di wilayah maritim harus meresapi kembali budaya maritim. Dengan penguatan nilai-nilai budaya maritim akan lebih memperkokoh semangat pembangunan di wilayah maritim, dengan kembali mengenal jati diri kemaritiman maka akan semakin baiklah kualitas sumber daya manusia yang memang memahami sikap dan nilai-nilai kemaritiman tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang kemudian melahirkan konsep community development dengan internalisasi nilai-nilai budaya maritim khususnya bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan memadukan konsep budaya maritim dan konsep community development maka penelitian ini akan menghasilkan sebuah konsep untuk penguatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang outputnya adalah kesadaran memiliki wilayah maritim, dan kemudian akan lahir semangat mempertahankan wilayah maritim tersebut dengan segala karakteristik daerah yang kemudian akan memperkuat Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi berbasis kemaritiman.

Kata kunci: Budaya, Maritim, Community Development

Community Development By Internalized Maritime Cultural Values In The Province Of Kepulauan Riau To Strengthen The Province Based Maritime

Abstract

Poros maritime development paradigm is one that is needed by the region-based maritime like Kepulauan Riau Province. With the development paradigm is expected that development in the area of maritime-based will feel more fairly and in accordance with the character of the maritime areas of development as compared with the uniform continental paradigm. Maritime culture is the culture of native Indonesia, to which Indonesia is a state of the islands. The most essential thing is the region's maritime community must permeate back to the culture. Strengthening maritime cultural values will further strengthen the spirit of development in the maritime area. By returning to know the identity of maritime then will the better the quality of human resources is to understand the attitudes and values. This research is a conceptual birth to the concept of community development with the internalisation of the values of maritime culture, especially for people in the Kepulauan Riau Province. By integrating the concept of maritime culture and the concept of community development, this research will produce a concept for strengthening communities in Riau Islands province whose output is consciousness has the maritime area, and then will be born the spirit of maintaining the maritime area with all the characteristics of the area that later would reinforce Kepulauan Riau Province as a maritime-based province.

Keywords : Culture, Maritime, Community Development

PENDAHULUAN

Gagasan Presiden Joko Widodo dalam Nawacita menjadikan pembangunan di daerah-daerah dan desa akan lebih terarah. Pembangunan di daerah akan lebih diperkuat dengan paradigma pembangunan “dari pinggir ke tengah” atau dengan kata lain “dari pesisir ke kota”. Dengan demikian konsep pembangunan di wilayah akan lebih difokuskan, tidak hanya membangun dengan konsep menyamaratakan dengan konsep continental seperti yang selama ini dirasakan oleh masyarakat di daerah. Pembangunan seolah hanya mengikuti pola pembangunan wilayah pusat sementara karakteristik pembangunan di wilayah atau daerah tertentu kurang menjadi perhatian. Sehingga daerah-daerah dengan karakteristik tertentu mengalami kesenjangan dalam hal pembangunan. Baik itu pembangunan sumber daya manusia dan juga sarana prasarana fisik lainnya.

Salah satunya adalah provinsi yang berbasis maritim, atau dengan istilah lain provinsi kepulauan. Provinsi maritim atau provinsi kepulauan selama ini mengalami masalah dalam hal pembangunan. Mulai dari tidak meratanya wilayah pembangunan antara satu pulau dengan pulau lainnya, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, dan kurang berkembangnya wilayah yang berada jauh di ujung negeri atau di wilayah perbatasan khususnya pantai terluar wilayah Indonesia seperti wilayah Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu perkembangan sumber daya manusianya juga tidak secepat dan sekualitas wilayah di wilayah pusat. Dengan lahirnya konsep pembangunan yang kita kenal dengan poros maritim, maka akan menjadi suatu peluang untuk melakukan perbaikan pembangunan pada daerah-daerah berbasis maritim.

Namun persoalan yang kemudian timbul adalah sudah sekian lama mentalitas masyarakat dan juga aparat pemerintah di wilayah maritim pun ikut menjadi continental selayaknya masyarakat yang ada

di wilayah pusat. Mentalitas konsumtif, lebih bersikap pasif dan menerima tanpa filtrasi terhadap globalisasi dalam menghadapi perubahan akan membahayakan wilayah maritim tersebut yang kemudian akan menggerus budaya lokal atau kearifan lokal yang justru menjadi penguat pembangunan di daerah wilayah maritim. Tergerusnya budaya maritim pada pola pikir pada masyarakat dan pemerintah di provinsi maritim akan membuat pembangunan juga akan terhambat dan justru pembangunan yang dilakukan malah menghancurkan karakteristik wilayah tersebut. Pembangunan yang diharapkan akan menghasilkan pembangunan berbasis kedaerah, pembangunan yang lebih mengakomodir kepentingan daerah maritim justru akan cepat menggerus budaya dan kearifan lokal apabila paradigma kemaritiman telah hilang dari pola pikir masyarakat dan pemerintahnya.

Oleh karena itu, sebelum dilakukannya pembangunan secara fisik maka yang perlu diperkuat adalah sumber daya manusia yang memang memahami konteks kemaritiman di wilayah maritim. Pemerintah dan masyarakat di wilayah maritim harus kembali sadar akan jati diri mereka sebagai masyarakat maritim dan harus memahami bahwa mulai dari lautlah mereka akan meraih sebuah kejayaan. Maka kebijakan poros maritim yang diciptakan oleh pemerintah pusat harus juga didukung oleh internalisasi nilai-nilai budaya maritim pada tubuh pemerintah di daerah sehingga kebijakan pembangunan dengan poros maritim akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di daerah serta pembangunan di wilayah maritim akan maju dan berkembang pesat tanpa menghilangkan unsur kearifan lokal yang akan menguatkan pembangunan itu sendiri.

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi berbasis maritim yang akan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan poros maritim yang telah dicetuskan oleh pemerintah pusat. Dimana

provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan ini menghadapi suatu paradigma pembangunan yang akan lebih disesuaikan dengan karakteristik kedaerahan. Tentunya untuk melakukan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah dan masyarakat harus memahami benar kondisi sosio kultural daerah tersebut. Sehingga pembangunan yang dilakukan justru tidak menghancurkan sosio kultural masyarakat itu sendiri. Kebijakan pemerintah pusat dengan poros maritim harus disambut dengan pemahaman yang holistik terhadap konsep daerah maritim itu sendiri oleh masyarakat, swasta dan juga pemerintah. Masyarakat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus sadar untuk kembali meraih kejayaan dari laut. Sehingga pembangunan akan berjalan sesuai dengan harapan. Jika tidak demikian, maka bagaimana pun kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah pusat untuk wilayah maritim tidak akan juga memperbaiki kondisi wilayah maritim.

Dengan momentum suksepsi pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2015 silam, merupakan sebuah momentum yang tepat untuk merubah paradigma masyarakat dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau kedepan khususnya pada konteks *community development* di Provinsi Kepulauan Riau untuk lebih memahami nilai-nilai budaya kemaritiman lebih holistik yang kemudian dijadikan semangat dalam rangka membangun masa depan provinsi berbasis maritim ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data berupa tulisan, rekaman secara lisan dan berbagai data yang bisa ditransposisikan sebagai teks (Maryaeni, 2005). Penelitian ini menggunakan pendekatan kebudayaan dimana penelitian yang meneliti gejala kemanusiaan, baik yang mengacu pada sikap, konsepsi, ideologi, perilaku, kebiasaan, karya kreatif dan

sebagainya (Maryaeni, 2005). Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif dengan strategi kebudayaan interaksi simbolik dimana data yang dihasilkan berusaha memahami makna, motif, wawasan dan ideologi budaya masyarakat sejalan dengan nilai yang diinternalisasikan. Penelitian ini juga mampu digolongkan ke dalam penelitian dengan *content analysis methodology* dengan pendekatan interaksi simbolik. Dalam penelitian *content analysis* peneliti melakukan Analisis isi dengan teknik membuat kesimpulan yang valid dari teks (atau bahan bermakna lainnya) dengan konteks penggunaan yang sesuai (Krippendorff, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Budaya Maritim

Secara sederhana budaya maritim, merupakan sebuah bentuk aktualisasi dari sebuah kebudayaan. Oleh karena itu memang tak bisa dilepaskan dari definisi kebudayaan terlebih dahulu sebelum kita jauh membahas apa yang dimaksud dengan budaya maritim. Menurut Supartono (2001) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan kata yang berasal dari kata budhi (tunggal) atau budhaya (majemuk) yang diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Selanjutnya menurut Koentjaraningrat (Supartono, 2001) menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. Kebudayaan juga merupakan manifestasi dari kehidupan setiap orang dan kehidupan setiap kelompok orang (Peursen dalam Supartono, 2001).

Kebudayaan itu memiliki wujud sebagaimana dikatakan oleh Koentjaraningrat (Supartono, 2001) yaitu:

1. Sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya,
2. Sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat,

3. Sebagai benda hasil-hasil karya manusia.

Kebudayaan juga yang menjadikan manusia menciptakan perbedaan antara konsep “kita” dan “mereka” yang kemudian membentuk sebuah identitas. (Lamont: Turner, 2001). Dimana selanjutnya Lamont (Turner, 2001) menjelaskan bahwa dengan identitas kebudayaan masyarakat akan bertindak beberapa hal yaitu menetapkan batas-batas simbolik, bersikap kolektif berdasarkan identitas nasional, bersikap pribadi, ketidaksamaan, dan resistensi, dan kemudian pembatasan dan rasisme (Lamont dalam Turner, 2001). Masyarakat dengan kebudayaan akan menetapkan batas simbolik dimana menetapkan garis antara orang, kelompok dan membedakan dengan lainnya. Perbedaan itu dapat diungkapkan melalui ketabuan, identitas budaya, sikap dan praktik-praktik, dan lebih umumnya melalui pola suka dan tidak suka. (Lamont dan Molnar dalam Turner, 2001), selanjutnya masyarakat akan bersikap kolektif sesuai dengan karakter nasional dimana masyarakat akan memilah antara “kita” dan “mereka”, bersikap kolektif atas nama “kita” dan memperkuat identitas budaya atas nama “kita” (Crozier, Inkeles, dan Lamont dalam Turner, 2001). Dengan identitas ini masyarakat digerakkan atas nama kebudayaan atau kultural (Narwoko dan Suyanto, 2004). Kebudayaan itu akan diperkuat dengan sebuah proses yang disebut dengan internalisasi, dimana Narwoko dan Suyanto (2004) menjelaskan internalisasi adalah sebuah proses yang dikerjakan oleh pihak yang tengah menerima proses sosialisasi, dan sosialisasi selanjutnya menurut Narwoko dan Suyanto (2004) adalah proses dimana individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti yang harus dilakukan, dan yang tak harus dilakukan. Jadi untuk menjadikan nilai-nilai budaya itu terinternalisasi dalam masyarakat, maka masyarakat harus melalui proses yang disebut dengan sosialisasi yang kemudian akan menginternalisasi kebudayaan itu

menjadi sebuah identitas yang akan menguatkan konsep “kita”.

Setelah masyarakat memahami konsep “kita” maka pendapat lain untuk penguatan nilai budaya berdasarkan konsep Mukhlis (2013) yaitu harus tahu diri terhadap peranan dan jabatan, sadar akan diri dimana harus tercipta kesadaran indrawi, rasional, spiritual dan juga tauhid, tahu dan sadar akan kenikmatan dan keuntungan yang telah diperoleh yang kemudian diaktualisasi dengan sikap merendahkan diri, pemalu atau penyegan, suka damai atau toleran, sederhana, periang, mempertahankan harga diri, dan memiliki harga diri akan kebudayaan itu yang diaktualisasi dalam bentuk akal budi dan berilmu, budi pekerti yang halus, komunikasi yang baik, dan baik dalam pengambilan keputusan.

Kebudayaan maritim merupakan salah satu bagian yang termasuk dalam kebudayaan. Karena kebudayaan maritim berasal dari hasil pemikiran yang berasal dari masyarakat yang hidup di wilayah perairan dan pesisir pantai. Kebudayaan maritim dapat juga dikatakan sebagai kebudayaan kelautan. Baiquni (2014) menyebutnya sebagai paradigma kepulauan (archipelago paradigm) yang kemudian diterjemahkan yaitu cara pandang suatu teori atau praksis yang mendasarkan pada kemajemukan masyarakat, keragaman ekosistem, dan kompleksitas wilayah kepulauan. Selanjutnya Baiquni (2014) menjelaskan bahwa paradigma kepulauan terkait dengan inspirasi atau ilham untuk menemukan jati diri teori, konteks historis, pergumulan persoalan pembangunan dan praksisnya, serta mengajukan kerangka paradigma baru. Paradigma kepulauan diletakkan dalam konteks wilayah kepulauan yang dapat dilacak dari sejarah peradaban nusantara, pasang surut perkembangan peradaban nusantara selalu dinamis dengan pusat-pusat keuangan yang bergeser dan berubah dari satu pulau ke pulau yang lainnya (Baiquni, 2014).

Budaya maritim jika dalam konsep Wijaya (2015) adalah budaya bahari maka dapat dijabarkan bahwa budaya bahari itu seperti adalah teknologi pelayaran mengarungi samudera raya, tanpa kompas magnetik atau elektronik seperti sekarang. Keberanian dan kecakapan puncak sang nakhoda adalah keberanian dan keterampilan mengarungi lautan dan mengemudikan kapal di tengah badai dan topan dengan selamat ke seberang. Ia harus pandai membaca isyarat alam, membaca tanda-tanda zaman. Keberanian dan kecakapan itu didukung oleh keluhuran budi dan kearifan jiwa, dengan menjunjung tinggi kaidah-kaidah keselarasan dengan alam, etika bahari, rerambu samudera. Jika petaka tak terduga tiba, dan kapal tertimpa bencana, yang terlebih dahulu diselamatkan adalah kaum terlemah, bayi dan perempuan, orang sakit dan penumpang, awak kapal kemudian, terakhir sang nakhoda, itupun jika ada kesempatan. Jika tidak, ialah juru selamat, ia martir, ialah tumbal, ialah korban, ialah pahlawan, ialah syuhada. Dengan berdasarkan konsep Wijaya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya bahari itu adalah budaya yang mengedepankan keberanian, kecakapan, keterampilan menghadapi berbagai masalah, budaya yang pandai membaca tanda kehidupan, tanda-tanda zaman, dengan keluhuran budi dan kearifan jiwa dan budaya melayani dan mendahulukan rakyat dan kaum yang lemah baik dalam kondisi yang baik ataupun darurat, dan budaya rela berkorban demi kepentingan umum.

Konsep Community Development

Pembangunan sumber daya manusia juga akan berkaitan dengan *community development* dimana pengertian pembangunan sumber daya manusia jika dikaitkan dengan proses *community development* adalah sebuah proses peningkatan kemampuan dan efektivitas dari sebuah masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk meraih keputusan hidup yang lebih panjang (ICMM, 2002).

Dalam melakukan *community development* maka hal yang harus diperkuat terlebih dahulu adalah melakukan penguatan modal sosial (Anderson dan Miligan dalam Fulbright, Anderson dan Aupos, 2006). Selanjutnya Anderson dan Miligan dalam Fulbright, Anderson dan Aupos (2006) menjelaskan bahwa modal sosial adalah proses yang spesifik antara masyarakat dan organisasi yang bekerja saling berkolaborasi dalam satu atmosfer kejujuran, yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan yaitu manfaat yang saling menguntungkan. Modal sosial bukan merepresentasikan kegiatan individu, melainkan adalah sebuah interaksi sosial yang meningkatkan dan mendukung interaksi antar masyarakat (Anderson dan Miligan dalam Fulbright, Anderson dan Aupos, 2006).

Kemudian Anderson dan Miligan dalam Fulbright, Anderson dan Aupos (2006) menjelaskan bahwa ada strategi yang harus dilakukan untuk membangun modal sosial dalam rangka *community development* yaitu:

1. Kepercayaan sosial dan interaksi,
2. Partisipasi politik dalam menyalurkan aspirasi politik,
3. Kepemimpinan publik dan keterlibatan dalam kelompok, klub-klub, diskusi lokal terkait persoalan masyarakat,
4. Memberikan sumbangan kepada kelompok-kelompok tertentu,
5. Keterlibatan berdasarkan keikhlasan dan penuh tanggung jawab sebagai anggota, partisipan, pendonor dan relawan,
6. Kesamaan keterlibatan dalam komunitas yang berbeda.

Jika kita berbicara konsep *community development* maka masyarakat hidup dalam organisasi yang disebut dengan organisasi masyarakat. Sebagai anggota masyarakat dan untuk meningkatkan kemampuan hidup

masyarakat, maka perlu diketahui motivasi dan kebutuhan masing-masing masyarakat di dalam organisasinya agar dapat melakukan peningkatan kualitas hidupnya (Lianto, 2013). Maka dalam membentuk modal sosial dalam *community development* dapat juga melihat teori kebutuhan Maslow (Lianto, 2013) yaitu:

1. Kebutuhan Fisiologis, yaitu kebutuhan masyarakat yang mendasar yaitu rasa lapar, haus, tempat berteduh, seks, tidur dan kebutuhan jasmani lainnya,
2. Kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan masyarakat terkait keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional,
3. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan untuk rasa memiliki dan dimiliki, kasih sayang, diterima dengan baik dan persahabatan,
4. Kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan masyarakat terkait penghormatan secara individu yaitu harga diri, prestasi dan otonomi, dan sebagai makhluk sosial yaitu, status, pengakuan dan perhatian,
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan masyarakat untuk menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri dan menjadi apa saja menurut kemampuannya.

Community Development dengan Peningkatan Sikap Mengenal Diri sebagai Masyarakat Berbudaya Maritim

Pertanyaannya pertama sekali yang diajukan adalah, mengapa kita harus mengenal diri sebagai masyarakat berbudaya maritim, atau apakah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau belum mengenal siapa dirinya. Sehingga provinsi berbasis maritim ini tidak mampu dibangun dengan optimal. Atau kurangnya rasa tahu akan diri yang menyebabkan lemahnya potensi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar adalah berbudaya Melayu, padahal dalam konsep pengembangan jati diri Melayu sudah diajarkan dalam Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji yang berbunyi "Barangsiapa mengenal diri, maka tahulah ia Tuhan yang Bahari". Namun ajaran Gurindam Dua Belas banyak yang tidak diketahui maknanya oleh masyarakat Kepulauan Riau, sehingga tak mengenal siapa dan dimana mereka bermastautin dan kemudian sikap apa yang harus mereka lakukan. Raja Ali Haji sudah mengingatkan dalam Gurindam Dua Belas tersebut, bahwa dengan mengenal diri maka kita akan mengenal siapa pencipta kita yang sifat-Nya juga bahari. Maksud Raja Ali Haji tersebut adalah ketika masyarakat mengenal akan diri maka kita akan mengetahui bahwa kita merupakan seorang hamba yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala kenikmatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan kenikmatan itu kita akan senantiasa bersyukur dengan cara menggunakan segala potensi yang ada demi kemajuan dan perkembangan kehidupan baik secara individu ataupun untuk masyarakat secara luas. Tuhan yang menciptakan kita juga memiliki sifat yang bahari sebagaimana konsep Wijaya (2015) yang menyatakan bahwa sifat bahari itu adalah sikap pemurah, penyayang, mengedepankan kepentingan orang lain dari kepentingan pribadi dan rela berkorban. Sifat Tuhan yang Bahari seperti Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pemberi akan dapat juga diaplikasikan oleh kita sebagai manusia dan juga sebagai masyarakat. Dengan syarat kita mengenal akan diri kita sebagai makhluk Tuhan dan segala kenikmatan dan potensi yang telah diberikan.

Konsep mengenal diri juga merupakan sebuah proses penguatan identitas budaya menurut Lamont (Turner, 2001) mengatakan dengan kuatnya identitas diri maka sebuah komunitas akan membatasi mana yang "kita" dan mana yang "mereka". Konsep "kita" akan

menguatkan identitas budaya jika mengenal diri siapa yang dimaksud “kita” tersebut. Konsep “kita” akan membentuk suatu semangat untuk bersatu, bertindak kolektif dalam atmosfir kejujuran, yang akan mengarahkan masyarakat pada suatu tujuan sosial yang saling menguntungkan (Anderson dan Miligan dalam Fulbright, Anderson dan Aupos, 2006).

Dalam sebuah buku juga Tenas Effendi (2006) mengatakan bahwa konsep tahu diri dapat dilihat dari nasihat berikut.

*Yang dikatakan tahu diri,
tahu hak dan kewajiban,
tahu hutang serta beban,
tahu adat jadi pegangan,
tahu syarat jadi sandaran,
tahu sunnah jadi pedoman,
tahu pusaka jadi warisan,
tahu ico dengan pakaian,
tahu adab dengan sopan,
tahu dimana tempat makan,
tahu dimana tempat berjalan,
tahu hidup berkesudahan,
tahu mati berkekalan,*

Berdasarkan nasihat dari Tenas Effendi tersebut dapat diketahui bahwa ketika kita ingin mengenal diri kita sebagai masyarakat berbudaya maritim, kita harus mengenal apa hak dan kewajiban kita di Provinsi berbasis maritim ini. Hak dan kewajiban berkenaan dengan apa yang harus dilakukan atau apa kontribusi kita di Provinsi Kepulauan Riau ini. Untuk menciptakan sebuah kontribusi yang berarti kita harus mengenal siapa dan dimana kita berjalan dan bertapak.

Untuk mengenal diri sebagai masyarakat berbudaya maritim, maka hal yang pertama dilakukan adalah pola pikir masyarakat haruslah merupakan pola pikir yang berbasis maritim, atau jika kita menggunakan istilah Baiquni (2014) yaitu paradigma kepulauan. Konsep “kita” harus diperkuat dengan penguatan paradigma terlebih dahulu yang kemudian akan memperkuat identitas dan dengan kuatnya identitas akan memperkuat *community development* yang akan mengarahkan

masyarakat pada tujuan luhur yang diharapkan yang dalam konteks ini adalah provinsi berbasis maritim yang kuat. Penguatan paradigma kepulauan pertama menurut Baiquni (2014) adalah menyadari bahwa kita merupakan suatu jalinan wilayah kepulauan. Dengan menyadari ini, kita akan memahami bahwa kita bertempat dan berjalan di wilayah yang berbasis kelautan dan kepulauan. Tentunya pola pikir kita tidak akan sama dengan pola pikir yang sifatnya continental.

Menyadari sebagai masyarakat yang hidup dalam jalinan wilayah kepulauan tentunya kita harus mengenal dan mengetahui bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Riau hidup di wilayah yang terbentang dalam bentuk gugusan pulau-pulau, hidup dalam wilayah yang lebih dominan wilayah laut dibanding wilayah daratannya, kemudian wilayah kelautan yang memiliki banyak sumber daya kelautan yang besar seperti ikan, terumbu karang, pemandangan laut yang terbaik dan harus juga mengetahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis yang saling berhadapan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan bahwa juga Cina. Dengan mengenali diri kita sebagai masyarakat maritim dengan segala potensi tersebut kita akan mampu menguatkan identitas “kita” dihadapan bangsa lain, dan dengan demikian kita mampu memperjuangkan mana yang hak dan mana yang kewajiban kita kepada Negara. Dengan mengenali diri sebagai masyarakat maritim kita juga harus sadar akan status dan peran, sadar status sebagai masyarakat maritim yang kemudian menjalankan peran kita sebagai masyarakat maritim dengan melakukan pengelolaan sumber daya maritim dengan optimal.

Tanpa mengenal diri sebagai masyarakat maritim yang hidup di wilayah kepulauan, yang memiliki sumber daya alam bawah laut yang luar biasa, yang memiliki posisi strategis, maka masyarakat Provinsi

Kepulauan Riau akan terus larut dalam pembangunan yang bersifat continental yang selama ini menjadi paradigma pembangunan di Indonesia. Dengan paradigma yang seolah menyamaratakan pembangunan dengan wilayah pusat, maka masyarakat Kepulauan Riau tidak akan pernah tahu untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang justru luar biasa jika memang pembangunan dilakukan dengan berbasis maritim.

Namun dengan adanya poros maritim dengan paradigma pembangunan “dari pesisir ke kota”, maka wilayah kepulauan akan mendapatkan suatu kesempatan untuk membangun sebagaimana mestinya dengan karakter wilayah kepulauan demi penguatan provinsi berbasis maritim. Untuk menghadapi kebijakan poros maritim, maka *community development* terlebih dahulu yang harus diperkuat agar masyarakat dapat terlibat dengan modal sosialnya menuju tujuan yang masyarakat tersebut harapkan. Dengan penguatan sikap mengenal diri sebagai masyarakat maritim, akan menguak kembali kesadaran masyarakat Kepulauan Riau, bahwa identitas “kita” sebagai masyarakat maritim adalah memiliki gugusan kepulauan dengan potensi laut yang luar biasa, dan posisi yang sangat strategis yang mampu memperkuat pembangunan Provinsi Kepulauan Riau demi mencapai masyarakat yang sejahtera. Dengan menyadari dua hal ini, kita akan mengetahui dan mampu mengoptimalkan apa yang seharusnya terjadi dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau harus dibangun berbasis kemaritiman, pembangunan potensi kelautan, pembangunan potensi bawah laut, pengembangan pariwisata, pembangunan produksi sumber daya kelautan dan tak hanya itu, dengan mengenal identitas sebagai masyarakat maritim, maka akan mampu memperjuangkan daerah maritim dan mempertahankan wilayah teritorial, dengan demikian usaha untuk mencaplok wilayah kelautan yang akan mengusik kedaulatan wilayah maritim akan

dipertahankan bukan saja dipertahankan oleh TNI sebagai kepanjangan tangan pemerintah, namun kedaulatan itu akan dipertahankan oleh seluruh masyarakat yang telah mengenal bahwa mereka hidup di provinsi berbasis maritim yang harus dipertahankan segala potensinya.

Community Development dengan Peningkatan Kesadaran Diri sebagai Masyarakat Berbudaya Maritim

Proses *community development* selanjutnya setelah melakukan peningkatan sikap mengenal diri yaitu peningkatan kesadaran diri. Setelah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau mengenal akan identitasnya sebagai masyarakat berbudaya maritim yang hidup pada gugusan pulau-pulau dengan segala potensi bawah dan atas laut yang luar biasa, maka proses selanjutnya adalah menciptakan kesadaran bahwa semua itu telah menjadi sebuah modal bagi kehidupan yang harus terus dikembangkan. Jika dalam proses pengenalan diri dimulai dari perubahan paradigma pada masyarakat. Maka pada proses peningkatan kesadaran ini adalah menyadari akan perjalanan sejarah yang telah membawa kita kepada suatu identitas budaya sebagai bangsa yang berbudaya maritim.

Secara sederhana, kita semua mengetahui dan pernah mendengar kata-kata dari sebuah lagu yaitu “nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudera, menerjang ombak tiada takut, menepuh badai sudah biasa. Lagu ini terkesan sederhana bagi masyarakat, atau hanya sebuah lagu anak-anak. Namun bagi masyarakat yang hidup dan berbudaya maritim. Lagu ini memiliki makna filosofis yang mendalam yang kemudian akan menguak rasa kesadaran diri sebagai masyarakat yang memiliki identitas sebagai bangsa bahari.

Untuk menguak rasa kesadaran tersebut, maka pertama harus kita buka kembali lembaran sejarah yang menyatakan

bahwa kita pernah jaya di laut, yang kemudian melahirkan semboyan *jalasveva jayamahe* yang artinya dilaut kita jaya. Berdasarkan catatan sejarah yang pernah kita ketahui bersama, bahwa pada bangsa kita pernah berdiri kerajaan maritim yang besar dan gemilang dan salah satu bukti bahwa kita pernah jaya dari laut, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melaka.

Berdasarkan catatan seorang pengelana yang pernah berkunjung ke Sriwijaya yang bernama *I-Tsing*, Sriwijaya merupakan kerajaan yang berperadaban tinggi, lebih kurang 1000 pendeta yang menuntut ilmu dan belajar di Sriwijaya, dan kemudian pada kurun waktu 955 M, Mas'udi menuliskan bahwa Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar dengan hasil bumi, kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana dan pala (Jalasena, 2012).

Selain Kerajaan Sriwijaya masih ada Kerajaan Malaka yang merupakan Kerajaan Maritim yang merupakan sebuah kerajaan Melayu yang gemilang pada kurun waktu 1400-1511 M. Dimana wilayah kekuasaannya membentang luas tidak hanya semenanjung Malaya termasuk Riau bahkan hampir seluruh Pulau Sumatera, Pattani Thailand, Brunei, Sarawak, Kalimantan sebelah Barat, namun juga menjalin kerja sama dengan Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Pada zaman itu pembangunan ekonomi sudah dijalankan dengan berbasis kemaritiman yaitu perdagangan dengan negara-negara lainnya. Mempertimbangkan wilayah Malaka sangat strategis, dan Kerajaan Malaka memanfaatkan dengan menciptakan pembangunan ekonomi berbasis maritim yaitu melakukan cukai yang dikenakan kepada kapal-kapal dagang yang melewati selat Malaka, pelabuhan dan aktivitas dagang pada saat itu sama seperti pelabuhan transito di Singapura saat ini. Selain itu Kerajaan Melaka juga melakukan perkongsian dagang dengan pedagang Persia, Arab, India, dan China (Dahlan, 2014).

Berdasarkan buku Sejarah Melayu (Dahlan, 2014) juga mengatakan bahwa Melaka merupakan sentral perdagangan berbasis maritim tiga jurusan yaitu ke dan dari India, China, dan kawasan lainnya di Asia Tenggara. Selain itu tempat berdagang rempah-rempah bangsa yang berasal dari Maluku, Sulawesi, Jawa, Borneo, Sumatera, Sulawesi, dan Sulu Mindanou Filipina, dan bahkan juga secara berantai sampai juga barang-barang dagangan tersebut ke Eropa (Dahlan, 2014).

Perdagangan berbasis maritim ini merupakan aktualisasi dari sebuah proses pengenalan dan kesadaran akan jati diri sebagai bangsa yang hidup berbudaya maritim. Sehingga segala potensi saat itu dapat dijalankan dengan optimal. Dua catatan sejarah singkat tadi berusaha menguak kembali kesadaran diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai masyarakat berbudaya maritim. Jika kita bayangkan hari ini, apakah kita sudah sadar akan potensi-potensi kelautan dan kebaharian yang Provinsi Kepulauan Riau miliki. Kebijakan poros maritim tentunya tidak akan berjalan dengan optimal jika masyarakat yang hidup dalam kawasan berbasis maritim tidak mengetahui dan sadar akan segala potensi yang dimilikinya. Sehingga akan ragu dan akan terkesan gamang untuk mengeksplorasi segala potensi dan kekuatan yang dimiliki. Untuk menghadapi poros maritim yang dicetuskan oleh pemerintah pusat maka ada beberapa usaha kesadaran yang harus ditingkatkan sebagaimana dijelaskan oleh Marsetio (2014) yaitu:

1. Kesadaran persatuan dan kesatuan yang kokoh antara wilayah kepulauan yang ada pada provinsi berbasis maritim,
2. Kesadaran generasi muda yang berwawasan maritim, karakter dan jiwa bahari yang kokoh,
3. Kesadaran kepemimpinan nasional dan daerah yang harus fokus pada sektor kelautan,

4. Kesadaran pentingnya pendidikan yang berbasis kelautan,
5. Kesadaran menjaga lingkungan hidup dalam aspek lingkungan kelautan,
6. Kesadaran untuk membangun industri berbasis maritim,
7. Kesadaran untuk berinovasi dan mencari domain bisnis berbasis maritim.

Tujuh langkah itu merupakan langkah untuk menguak kesadaran yang harus diciptakan dalam rangka *community development* untuk memperkuat provinsi berbasis maritim. Selain itu perlu juga penguatan jiwa kebaharian yang sebagaimana dikatakan oleh Wijaya (2015) yaitu keberanian dan kecakapan puncak sang nakhoda adalah keberanian dan keterampilan mengarungi lautan dan mengemudikan kapal di tengah badai dan topan dengan selamat ke seberang. Ia harus pandai membaca isyarat alam, membaca tanda-tanda zaman. Keberanian dan kecakapan itu didukung oleh keluhuran budi dan kearifan jiwa, dengan menjunjung tinggi kaidah-kaidah keselarasan dengan alam: etika bahari, rerambu samudera. Jika petaka tak terduga tiba, dan kapal tertimpa bencana, yang terlebih dahulu diselamatkan adalah kaum terlemah, bayi dan perempuan, orang sakit dan penumpang, awak kapal kemudian, terakhir sang nakhoda, itupun jika ada kesempatan. Jika tidak, ialah juru selamat, ia martir, ialah tumbal, ialah korban, ialah pahlawan, ialah syuhada. Sikap yang perlu disadari sesuai dengan jiwa kebaharian di atas adalah, keberanian dan keterampilan membaca isyarat alam dengan memahami dan menyadari potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau, kemudian mampu membaca tanda-tanda zaman, artinya mampu mengelola potensi bisnis dan input-input yang mampu mendatangkan keuntungan bagi pembangunan secara umum dan masyarakat secara khusus, namun harus didasari oleh keluhuran, kejujuran dan kearifan sehingga

proses modal sosial akan semakin kuat dan proses *community development* dapat tercapai, dan sikap melayani, mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan golongan atau pribadi.

Dengan peningkatan kesadaran akan hal-hal di atas, maka identitas provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi berbasis maritim akan semakin kuat, yang didukung oleh kesadaran masyarakatnya sebagai masyarakat yang hidup berbudaya maritim.

Community Development dengan Peningkatan Rasa Kesadaran akan Keuntungan sebagai Masyarakat Berbudaya Maritim

Community Development juga tak dapat diperkuat jika rasa akan keuntungan atau yang kita sebut dengan rasa syukur tidak ada. Rasa syukur ini yang akan mengimbangi rasa tahu akan mengenal diri dan juga kesadaran diri. Jika kenal dan sadar tanpa rasa syukur akan lahirlah sebuah sikap yang arogan, sombong bahkan jika dikaitkan dengan pembangunan berbasis maritim akan lahirlah masyarakat dan pemimpin yang otoriter dan individualistis, yang justru akan merusak budaya dan identitas itu sendiri. Rasa kesadaran keuntungan atau dengan kata lain rasa syukur itu adalah terkait dengan segala potensi yang telah kita miliki baik secara budaya, potensi kelautan dan sumber daya lainnya. Rasa syukur kita terhadap hal-hal ini akan menyebabkan pengelolaan potensi dan sumber daya kelautan akan optimal dan tepat, dan memperkecil tindak korup dan destruktif yang akan menghasilkan tindakan yang melanggar hukum seperti illegal fishing, pemboman terumbu karang, pukut harimau, eksploitasi hasil laut ilegal dan lain sebagainya. Aplikasi rasa syukur ini adalah terciptanya pengelolaan segala potensi kelautan dengan tepat.

Rasa syukur kita adalah terkait dengan wilayah geografis kita sebagai negara kepulauan yang kemudian menjadikan kita negara kepulauan terbesar di dunia. Dimana secara geografis kita terletak di antara benua

Asia dan Benua Australia. Kemudian bangsa Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 2.7 juta kilometer persegi atau 70% dari luas NKRI. Dengan demikian Indonesia merupakan sebuah negara Maritim dan bukanlah negara agraris, karena daratan yang tersisa hanya 30% atau hanya berkisar 1,9 juta kilometer persegi. Maka Indonesia harus menyadari bahwa laut sebagai media pemersatu dan juga sebagai media penghubung antara satu wilayah atau bahkan negara lainnya. Sehingga dengan demikian sudah selayaknya jika paradigma pembangunan yang dilakukan adalah berbasis maritim atau kelautan bukan berbasis kontinental sebagaimana selama ini terjadi. Sudah seharusnya Indonesia fokus akan pembangunan kelautan dimana kedaulatan Indonesia juga salah satunya berasal dari laut. Jika tak menyadari hal ini, maka kedaulatan kita dari sisi kelautan bisa terampas oleh negara lain seperti Pulau Simpadan dan Ligitan. Begitu juga Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah provinsi Kepulauan Riau juga lebih didominasi oleh wilayah lautan, dan merupakan wilayah yang tersusun dari gugusan pulau-pulau yang juga berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan juga Cina. Sudah selayaknya juga dengan kondisi seperti ini, Pemerintah dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau menyadari bahwa laut adalah sumber kehidupan dan pemersatu sekaligus jati diri. Dengan rasa syukur terhadap geografis yang telah diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau, maka sudah selayaknya kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada kita, yaitu berbasis kemaritiman.

Rasa syukur dengan keadaan geografis ini dapat diaktualisasi dengan banyak cara, beberapa caranya antara lain, pertama adalah memanfaatkan pelabuhan sebagai media perhubungan, transportasi dan juga bisnis. Hal inilah yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya dan Malaka mencapai puncak kegemilangan dengan cara tepat

memanfaatkan pelabuhan dan kondisi geografis yang telah diberikan. Oleh karena itu pemerintah lewat poros maritim harus menjadikan pelabuhan sebagai titik awal pembangunan. Kemudian hal ini harus didukung oleh pemerintah daerah yang kemudian melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat yang telah terbentuk rasa pengenalan diri dan kesadaran diri sebagai masyarakat maritim harus memperkuat modal sosial untuk mencapai sebuah tujuan yaitu kesejahteraan dan pembangunan yang optimal di provinsi berbasis maritim. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan yang memang harus dimulai dari pelabuhan. Pelabuhan bukan saja media komunikasi atau angkutan antar pulau, akan tetapi juga media bisnis yang berbasis kelautan, sehingga pelabuhan dagang harus diciptakan dan dibangun. Atau menetapkan cukai terhadap kapal-kapal dagang yang lewat di perairan Kepulauan Riau. Termasuk bisnis potensi laut yang ada harus juga dikelola dengan baik oleh masyarakat tempatan sebelum dimanfaatkan atau diambil oleh pihak lainnya. Dari pelabuhanlah, kita mampu mengawasi laut-laut kita, menjaga kedaulatan kita di batas garis pantai terluar, maka sudah selayaknya pembangunan memang dimulai dari pesisir.

Cara kedua dalam mengaplikasikan rasa syukur kita terhadap wilayah maritim yang telah diberikan kepada kita adalah membuka jalur perdagangan bebas yang melibatkan berbagai negara lain di dunia. Setelah pelabuhan dioptimal dengan baik, maka pintu masuk sumber ekonomi harus juga dimulai dari laut, dengan melakukan atau membuka perdagangan bebas. Pelabuhan-pelabuhan peti kemas harus dibangun dalam rangka memperkuat ekspor impor barang ke dalam dan keluar negeri. Namun harus diperkuat dengan cukai sehingga daerah mendapatkan keuntungan yang signifikan. Hal inilah yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Malaka pada

zamannya. Dalam konteks ini penguatan lembaga free trade zone harus fokus dan sepenuh hati. Agar pengelolaan pelabuhan dapat dilakukan dengan optimal.

Cara ketiga dalam mengaplikasikan rasa syukur kita terhadap wilayah maritim yang telah diberikan kepada kita adalah memperluas fungsi pelabuhan yaitu dengan cara penyediaan tempat berlabuh yang aman dan nyaman bagi kapal-kapal yang ingin beristirahat, perbaikan atau menunggu tempat sandar, penyediaan pelabuhan bongkar muat yang efisien, penyediaan galangan kapal yang mumpuni, penyediaan pengisian bahan bakar dan air tawar yang kompetitif, mewajibkan penggunaan kapal pandu bagi kapal yang akan melintasi jalur sempit, penyediaan keperluan awak kapal seperti tempat rekreasi, wisata dan pusat pembelanjaan, penyediaan akses informasi yang cepat dan manajemen pelabuhan.

Dari penjelasan di atas, maka pelabuhan menjadi salah satu objek yang harus disadari akan mendatangkan banyak keuntungan bagi daerah dan *community development* harus diperkuat dengan cara menyadarkan masyarakat bahwa pelabuhan merupakan pintu masuk sekaligus awal serta sebuah potensi dari pembangunan wilayah maritim. Oleh karena itu jika kebijakan poros maritim ingin berjalan dengan optimal maka pelabuhan menjadi salah satu objek pembangunan yang harus diperhatikan sehingga perdagangan bebas, dan pengelolaan sumber kelautan dapat berjalan dan akan mendatangkan keuntungan bagi provinsi berbasis maritim. Pembangunan wilayah kelautan memang harus dimulai dari mengoptimalkan pelabuhan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke wilayah berbasis maritim. Dengan demikian pelabuhan bukan lagi pintu keluar atau pintu belakang yang justru tidak diperhatikan yang kemudian melahirkan kejahatan dilautan, seperti penyeludupan, illegal fishing, pengeboman terumbu karang dan pukuk harimau. Agar kejahatan di laut ini hilang maka sudah

sepantasnya pelabuhan menjadi pintu depan dalam konteks pembangunan di daerah khususnya berbasis maritim.

Community Development dengan Pembentukan Harga Diri atau Marwah sebagai Masyarakat Berbudaya Maritim

Dalam proses *community development*, setelah masyarakat dikuatkan dalam aspek pengenalan harga diri, kesadaran diri dan kemudian kesadaran akan keuntungan sebagai bangsa yang berbudaya maritim, maka aspek selanjutnya yang akan mengintegrasikan ketiga aspek tadi adalah pembentukan harga diri atau marwah sebagai masyarakat yang berbudaya maritim. Mengapa pembentukan harga diri atau marwah perlu dibentuk untuk memperkuat *community development*, harga diri atau marwah merupakan sebuah kebutuhan individu atau masyarakat dalam sebuah organisasi atau komunitasnya. Harga diri atau marwah jika berdasarkan teori Maslow (Lianto, 2013) adalah sebuah kebutuhan akan penghargaan dimana masyarakat berbudaya maritim ingin diketahui dan dihargai oleh pihak lainnya. Selain itu juga merupakan sebuah kebutuhan yang sifatnya aktualisasi diri, dimana masyarakat berbudaya maritim ingin diketahui oleh orang lain, diakui sepenuhnya dengan karakteristik dan kemampuannya. Dengan penghargaan diri dan aktualisasi diri, masyarakat di provinsi berbasis maritim ingin daerahnya diakui, dihargai, dihormati dan diyakini keberadaannya.

Sebagaimana masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, selama ini merasa selalu dipinggirkan, selalu tidak dipedulikan oleh pemerintah pusat, dan kadang Provinsi Kepulauan Riau masih dianggap Provinsi Riau yang sebenarnya telah lebih kurang 13 tahun berpisah. Namun pemerintah pusat masing menganggap Provinsi Kepulauan Riau adalah Provinsi Riau. Hal ini akan mengusik kedaulatan berupa pengakuan dari pihak lain sebagai sebuah provinsi maritim. Bahkan sering juga wilayah perairan Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas dianggap tidak memiliki wilayah padahal disinilah kedaulatan bangsa Indonesia jika dipandang dari garis pantai dan pantai

terluar. Selain itu, terkadang pemerintah pusat selalu ego dengan pembangunan yang bersifat kontinental yang cenderung menyamaratakan pembangunan wilayah kepulauan sama dengan wilayah pusat yang semua akses, sarana dan prasarana tersedia, tanpa melihat bagaimana sebenarnya kondisi wilayah kepulauan.

Hal-hal inilah yang terkadang mengusik jiwa dan identitas masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau sebagai masyarakat di provinsi berbasis maritim, karena bagaimana pun kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan wilayah maritim yang di dalam wilayah tersebut juga terdapat batasan kedaulatan Republik Indonesia. Namun terkadang tak dapat disalahkan pihak pemerintah pusat, mungkin selama ini masyarakat Kepulauan Riau kurang mengenal diri mereka sebagai bangsa maritim yang berimbas pada tidak mengenalnya potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian juga kurangnya kesadaran akan kesejarahan yang dimiliki oleh bangsa maritim, dimana hal tersebut merupakan sebuah kearifan lokal bangsa maritim itu sendiri. Tanpa mengenal sejarah bangsa maritim, maka masyarakat maritim tidak akan pernah tahu akan potensinya sebagai bangsa maritim, ataupun dengan kata lain mengenal sejarah namun tak pernah menangkap sebuah kesadaran untuk belajar dari sejarah maka sama saja kita hanya menjadikan sejarah sebagai sebuah kenangan indah yang tak akan pernah terulang kembali. Jika ini terjadi maka kita juga akan sulit mengenal siapa "kita" dalam konsep Lamont (Turner, 2001) yang merupakan identitas. Kemudian hal yang perlu diperkuat adalah rasa kesadaran akan keuntungan atau rasa syukur yang akan membuat kita bertindak mengoptimalkan sumber daya yang telah kita peroleh dari Tuhan baik secara geografis dan geopolitik, dan kurangnya rasa syukur ini terkadang kita tidak bertindak untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut, melainkan kita mengelolanya dengan salah atau bahkan disia-siakan sehingga segala sumber daya itu tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat maritim tersebut.

Harga diri atau marwah akan terbentuk ketika tiga aspek tadi dilengkapi dan terinternalisasi. Harga diri atau marwah

sebagai bangsa maritim akan kuat jika kita mengenal diri sebagai bangsa berbudaya maritim yang hidup dalam gugusan pulau dengan segala potensi sumber daya kelautan yang luar biasa, kemudian kita menyadari diri sebagai bangsa yang berbudaya maritim dengan mengambil pelajaran dari sejarah bangsa maritim yang hidup di masa silam yang kemudian akan menjadikan kita sadar dan bertindak untuk mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya kita mensyukuri sebagai rasa sadar akan keuntungan yang kita miliki sebagai daerah maritim yang dengan rasa syukur itu masyarakat dan pemerintah akan bersinergi dalam melakukan pembangunan pada segala potensi seperti pelabuhan, sumber daya kelautan, kedaulatan daerah perbatasan, pariwisata, dan posisi strategis.

Kebijakan poros maritim yang diciptakan oleh pemerintah pusat menjadi suatu kesempatan emas bagi masyarakat maritim untuk memiliki dan membentuk harga diri dan marwah yang kemudian akan lahir semangat memperkuat provinsi Kepulauan Riau ini sebagai provinsi maritim, selain itu akan mampu memudahkan pemerintah Republik Indonesia untuk memelihara kedaulatan maritim khususnya di wilayah yang berada di daerah perbatasan, seperti Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.

Dengan pembentukan serta penguatan harga diri dan marwah sebagai masyarakat maritim, maka kita akan sadar dan akan terus memperkuat serta menegakkan kedaulatan bangsa maritim "kita" sebagai sebuah identitas bangsa maritim yang berbudaya maritim sebagaimana konsep yang dirumuskan oleh Rektor IPB (2015) yaitu pertama kita adalah bangsa maritim yang memiliki potensi geo-fisik yaitu letak yang sangat strategis antara beberapa wilayah negara asing seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam dan Cina, dengan posisi letak yang sangat strategis kita akan mampu mengetahui dan memperkuat kedaulatan bangsa, ekonomi, politik dan wilayah agar kita tak mudah dipengaruhi namun justru mendapatkan keuntungan bagi wilayah maritim yang kita miliki, kedua, kita adalah bangsa maritim yang memiliki geo-politik dan geo-strategis yaitu posisi strategis yang

memiliki nilai politik yang tinggi dari aspek ekonomi regional dan internasional dan pertahanan kawasan maupun internasional, dengan demikian kita akan melakukan diplomasi politik dan ekonomi dengan tepat dan cermat sehingga diplomasi tersebut memang menguntungkan bagi wilayah regional dan juga nasional, ketiga, kita adalah bangsa maritim yang memiliki geo-kultural yang kuat dan khas dari sisi pengelolaan sumber daya yang berbasis kebaharian, etnis yang berbudaya maritim, dan teknologi yang khas yang bertahan sejak zaman nenek moyang sampai sekarang dalam koridor budaya maritim, dengan hal ini maka masyarakat maritim akan menjaga identitas kulturalnya sehingga tak mudah dipengaruhi oleh kultural bangsa lain terutama yang sifatnya destruktif, keempat, kita adalah bangsa maritim yang memiliki geo-ekonomi yang sangat luar biasa seperti yang dapat diperbaharui seperti perikanan dan kelautan, tidak dapat diperbaharui, seperti pertambangan dan sumber daya alam, fungsi perhubungan laut seperti transportasi laut, dan jasa lingkungan seperti pariwisata. Dengan menyadari hal ini masyarakat maritim akan mengelola dengan optimal segala potensi geo-ekonomi tersebut, dan terakhir adalah kita adalah bangsa maritim yang memiliki ideologi sebagai bangsa maritim yang berparadigma kelautan dan kebaharian, berwawasan nusantara yang berbasis kelautan yang akan memperkuat jati diri sebagai masyarakat yang berbasis maritim.

Dengan penguatan harga diri dan marwah sebagai masyarakat berbudaya maritim dalam lima aspek tadi, maka proses *community development* akan berjalan optimal sehingga melahirkan semangat kebaharian sebagai masyarakat maritim yang akan terus mempertahankan, memperkuat, dan menegakkan kedaulatan wilayah maritim khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi yang berbasis maritim yang kuat dan tangguh dalam lingkup regional dan juga nasional bahkan internasional dalam rangka mendukung kebijakan poros maritim yang juga akan memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Membangun *community development* dengan penguatan nilai-nilai budaya maritim harus dimulai dengan membangun suatu sikap mengenal akan diri sebagai masyarakat yang berbudaya maritim. Dengan mengenal diri maka masyarakat akan sadar dan akan bertindak dengan tindakan yang sesuai dengan statusnya sebagai masyarakat maritim kemudian diaktualisasi dalam peran-peran strategis sebagai masyarakat yang terlibat dalam memperkuat provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi berbasis maritim. Kemudian diikuti dengan memiliki kesadaran akan diri sebagai masyarakat maritim yang memperoleh kejayaan di lautan seperti sebuah semboyan *jalasveva jayamahe* atau pun mengingat kembali bahwa nenek moyang kita dahulu adalah bangsa pelaut yang meraih kejayaan dan kegemilangan di lautan yang dibuktikan dengan perjalanan sejarah pada masa silam. Sikap yang selanjutnya adalah kita sadar akan segala potensi yang telah diberikan Tuhan sebagai bonus geografis pada Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi kelautan baik bawah laut, atas laut dan juga segala potensi kebaharian yang juga terdapat di daratannya. Dengan rasa sadar dan syukur akan potensi tersebut maka kita akan melakukan pengelolaan secara optimal sehingga mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya hal terakhir yang harus dibentuk adalah pembentukan harga diri dan marwah yang kuat sehingga kedaulatan kita sebagai bangsa maritim tidak dapat diusik oleh bangsa lain. Atau kita akan terus menegakkan kedaulatan sebagai bangsa maritim yang memiliki segala potensi yang mampu menguntungkan banyak pihak baik secara regional dan juga nasional. Dengan empat tingkatan proses tersebut maka *community development* dapat dijalankan dengan baik dan dengan catatan keempat tingkatan proses penguatan nilai tersebut harus menjadi konsensus yang akan memperkuat modal sosial dalam mencapai tujuan bersama yang lebih baik dan sejahtera khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan juga menjadi provinsi maritim yang kuat, tangguh dan bermarwah. Dengan momentum kebijakan poros maritim, maka sudah selayaknya empat proses internalisasi budaya maritim kita perkuat demi

memperkuat Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi maritim.

Saran

Penguatan *community development* dengan penguatan nilai-nilai budaya maritim harus melibatkan banyak *stakeholders*. Diharapkan Lembaga Adat Melayu, Tokoh Adat, Budayawan, Akademisi banyak melakukan sosialisasi nilai-nilai budaya maritim kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut harus terinternalisasi dalam ranah pendidikan baik formal dan juga informal. Pendidikan formal dengan memasukkan nilai-nilai budaya maritim yang kita miliki menjadi bagian kurikulum muatan lokal di dunia pendidikan di semua tingkat. Ditataran non formal dapat dilakukan dengan cara banyak memberikan pelatihan, penataran, dokumentasi penelitian dan referensi yang mampu diakses masyarakat secara luas, sehingga nilai-nilai budaya tersebut tersebar ke masyarakat dan diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiquni. (2014). Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim. Makalah disampaikan pada Kongres Maritim Indonesia pada 23-24 September 2014 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Dahlan, Ahmad. (2014). *Sejarah Melayu*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia
- Effendi, Tenas. (2006). *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta. Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu
- Fulbright, Karen. Anderson. Aupos, Patricia. (2006). *Communitie Change: Theories, Practice and Evidence*. Washington. The Aspen Institute
- ICMM. (2002). *Community Development Toolkit*. London. ICMM
- Jalasena. (2012). Jalan Terjal Menuju Kemerdekaan Maritim. *Jurnal. Edisi No.08 Agustus Tahun II 2012*. Hal.6-12
- Krippendorff, Klaus. (2004). *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. United Kingdom. Sage Publications
- Lianto. (2013). Aktualisasi Hirarki Teori Kebutuhan Abraham Maslow Bagi Peningkatan Kinerja Individu Dalam Organisasi. *Jurnal Online*.
- Marsetio. (2014). Manajemen Stategis Negara Maritim dalam Perspektif Ekonomi dan Pertahanan. Makalah. Disampaikan pada orasi ilmiah di Jakarta pada Tanggal 20 November 2014
- Maryaeni. (2005.) *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Mukhlis, Suhardi. (2013). Transformasi Nilai Budaya Melayu Dalam Sikap Masyarakat, Kepemimpinan Pemerintahan, dan Etos Kerja Pelayanan Publik Aparatus Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Disertasi. Johor. Universitas Teknologi Malaysia
- Narwoko. Dwi, Suyanto, Bagong. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Rektor IPB. (2015). Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim, Beberapa Catatan IPB. Makalah disampaikan pada Konvensi Kampus XI Forum Rektor Indonesia di Medan 23 Januari 2015
- Supartono. (2001). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Turner. Jonathan. H. (2001). *Handbook of Sociological Theory*. Newyork. Springer
- Wijaya, Mendra (2015). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Diakses dari www.id.scribd.com pada tanggal 26 Desember 2015

PROFIL SINGKAT

Dr. SUHARDI MUKHLIS, Drs., M.Si., Ph.D, lahir di Midai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 11 Juni 1966, Menyelesaikan Pendidikan SDN 060 di Midai, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Tanjungpinang, dan selanjutnya di SMAN 2 Tanjungpinang. Menempuh pendidikan Sarjana di FMS Ikopin Bandung (mendapat gelar Drs.), kemudian menempuh

pendidikan Magister di Universitas Padjajaran (dengan gelar M.Si), menempuh pendidikan Doktorat di dua perguruan tinggi yaitu Universitas Padjajaran (mendapat gelar Dr), dan Universitas Teknologi Malaysia (mendapat gelar Ph.D)

RENDRA SETYADIHARJA, S.Sos., M.I.P, Lahir di Tanjungpinang tanggal 20 Maret 1986, merupakan seorang penyair dan juga dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 003 Tiban Batam (lulus tahun 1999), kemudian melanjutkan ke Madrasah

Tsanawiyah Negeri Tanjungpinang (lulus tahun 2002), selanjutnya melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Tanjungpinang (lulus tahun 2005). Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (lulus tahun 2010), kemudian menyelesaikan magisternya di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (lulus tahun 2014) dengan predikat Cumlaude dan Terbaik.